**PENILAIAN KESEHATAN
BANK SYARIAH**

MAKALAH

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Auditing Perbankan Syariah Program
Studi Perbankan Syariah Semester V Tahun 2021*

Oleh :

Warda

Nim : 90500119077

Perbankan Syariah C

Dosen Pengajar :

ST. HAFSAH UMAR, M.Ak.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021/2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan segala berkah, taufiq dan bimbingannya untuk menyelesaikan tugas makalah yang berjudul ***“Penilaian Kesehatan Bank Syariah”***.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW tercinta, yang memimpin kita dari zaman kegelapan ke zaman terang.

Penyusun berharap makalah ini dapat membantu pembaca memahami dan mempelajari lebih lanjut tentang penilaian kesehatan Bank Syariah. Sebagai penulis, saya memahami bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, sebagai penyusun kami mengharapkan dan menerima segala bentuk saran dan kritik dari para pembaca semoga bermanfaat dalam memperbaiki dan memajukan makalah-makalah selanjutnya.

Makassar, 20 November 2021

Warda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan.....	2
BAB II	
KAJIAN TEORI.....	3
A. Definisi Kesehatan Bank.....	3
B. Definisi Bank Syariah.....	4
BAB III	
PEMBAHASAN	5
A. Konsep Penilaian Kesehatan Perbankan Syariah.....	5
B. Pemenuhan Peraturan Perbankan.....	7
C. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RKPM).....	7
D. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK)/ Pembiayaan.....	8
E. Penentuan Kualitas Aktiva Produktif.....	10
F. Kriteria Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap (PPAP).....	11
G. Kegiatan Restrukturisasi Kredit.....	12
H. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.....	14
I. Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR).....	17
J. Financing To Deposit Ratio (FDR).....	18
K. Non Performing Financing (NPF).....	19
L. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).....	20
BAB IV	
PENUTUP	22
A. Kesimpulan.....	22
B. Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatan nya sesuai dengan ketentuan permodalan, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Salah satu peraturan perbankan yang paling penting dan menjadi hasil dari bagian pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional adalah tata cara penilaian kesehatan bank.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assesment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Rating/RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi. Tingkat kesehatan perbankan syariah dilakukan berdasarkan sistem peringkat CAMELS, yakni permodalan (Capital), aset (Asset), kapabilitas manajemen (management), kinerja keuangan (earning), likuiditas (Liquidity) dan sensitivitas resiko.¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penilaian kesehatan Bank?
2. Bagaimana pemenuhan peraturan Perbankan?
3. Bagaimana Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RKPM)?
4. Bagaimana Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK)?
5. Bagaimana Penentuan Kualitas Aktiva Produktif?
6. Bagaimana Kriteria Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)?
7. Bagaimana kegiatan Restrukturisasi Kredit?
8. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah?

¹ Amalia Nur Zubaidah and Toni Hartono, 'Analisis Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return on Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.1 (2019), 16–30.

9. Bagaimana cara menganalisis Capital Adequacy Ratio (CAR)?
10. Bagaimana cara menganalisis Financing To Deposit Ratio (FDR)?
11. Bagaimana cara menganalisis Non Performing Financing (NPF)?
12. Bagaimana cara menganalisis Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep penilaian kesehatan Bank.
2. Untuk mengetahui pemenuhan peraturan Perbankan.
3. Untuk mengetahui Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RKPM).
4. Untuk mengetahui Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK).
5. Untuk mengetahui Penentuan Kualitas Aktiva Produktif.
6. Untuk mengetahui Kriteria Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
7. Untuk mengetahui kegiatan Restrukturisasi Kredit.
8. Untuk mengetahui penerapan prinsip mengenal nasabah.
9. Untuk memahami dan menganalisis Capital Adequacy Ratio (CAR).
10. Untuk memahami dan menganalisis Financing To Deposit Ratio (FDR).
11. Untuk memahami dan menganalisis Non Performing Financing (NPF).
12. Untuk memahami dan menganalisis Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan Bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik.¹ Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan.

Budisantoso dan Triandaru mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri.
2. Kemampuan mengelola dana.
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan kata lain, tingkat kesehatan bank juga erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia).

Menurut *Bank Of Settlement*, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan control terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen dan aspek likuiditasnya. Pengertian kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah Bank

dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Aset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan aspek lain berhubungan dengan usaha bank.²

B. Definisi Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan.

Menurut Kasmir bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran telepon, listrik, air pajak, uang kuliah dan pembayaran yang lainnya.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian dari Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam. Sesuai dengan prinsip yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Pendapat lain menurut Hasibuan bahwa Bank berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam (Al-Qur'an dan Hadits). Dalam tata cara tersebut, di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

Dari definisi bank syariah di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah untuk membiayai kegiatan yang halal.³

² 'BAB II', 35.2 (2011), 13–37.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Penilaian Kesehatan Perbankan Syariah

1. Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah

Kasmir, (2018 :174), Perkembangan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersifat dinamis, tidak hanya dilakukan untuk bank konvensional saja, tetapi juga dilakukan untuk Bank Syariah baik untuk bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah untuk mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 dalam Kasmir (2018:175) tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Dengan meningkatnya Eksposur resiko akan merubah profil resiko bank Sya yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dalam penilaian tingkat kesehatan, Bank Syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank (inherent risk), yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. Faktor faktor penilaian tingkat kesehatan bank antara lain sebagai berikut :

- a. Kualitas aset (asset quality)
- b. Manajemen (management)
- c. Rentabilitas (earning)
- d. Likuiditas (liquidity)
- e. Resiko Pasar (sensitivity to market risk)

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip

³ 'BAB II'.

Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.⁴

2. Pentingnya Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah masih terbilang rendah, saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan bank konvensional. Maka selain perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan bank syariah, diperlukan pula penilaian tingkat kesehatan bank syariah agar masyarakat mengetahui kinerja suatu bank syariah. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan usahanya dengan lancar, sanggup memenuhi kewajibannya dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut aman serta mampu mengembangkan sumber daya yang sudah dipercayakan pemilik pada manajemen.

Menurut Hermawan Darmawi (2011) hasil penilaian kondisi bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa mendatang oleh bank, sedangkan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi pengawasan perbankan.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya peraturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang benar-benar sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.⁵

⁴ 'BAB II', 21, 2011, 10–27.

⁵ Ireyn Filania Raturandang, Joula Rogahang, and Dantje Keles, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity) Pada PT. Bank Sulut-Go', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6.3 (2018).

B. Pemenuhan Peraturan Perbankan

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RKPM)

Kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) dimana Current Asset Ratio (CAR) minimal 8% yang dihitung dari perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut Rasio (ATMR)

2. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK)/ Pembiayaan

Yakni ketentuan Batas maksimum penyediaan dana yang berkaitan dengan perlakuan oleh bank pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu

3. Penentuan Kualitas Aktiva Produktif

Merupakan penanaman dana Bank dalam kegiatan kreditt/pembiayaan, standar Bank Indonesia dan penyimpanan Dana Antar Bank dengan menerapkan prinsip lebih hati-hati

4. Kriteria Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap (PPAP)

Yaitu Penyisihan yang wajib dibentuk oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penutupan risiko kerugian besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) umum minimal 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancer (tidak termasuk standar Bank Indonesia)

5. Kegiatan Restrukturisasi Kredit

Kegiatan Restrukturisasi Kredit yang dapat dilakukan seorang debitur dapat mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit atau bagi hasil dan debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi

6. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Bank sebaiknya menerapkan dan mempunyai kebijakan mengenai anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dengan cara menetapkan prosedur penerimaan, mengidentifikasi, memantau rekening dan transaksi serta manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal Nasabah.

C. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RKPM)

Menurut Dendawijaya (2009) KPM atau Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung

risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh danadana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank ROA KPMM BOPO FDR INFLASI Iqbal dan Budiyanto KPMM, BOPO, FDR, Inflasi terhadap ROA untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

KPMM merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

$$\text{KPMM} = \frac{\text{Modal Bank Total}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

D. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMPK)

BMPK merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif.

1. Cakupan dan Dasar Perhitungan BMPK

Pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (LLL) adalah:

- a. Kredit yang diberikan Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan baki debet. Pengertian baki debet tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga (bunga dalam penyelesaian) pada rekening administratif. Bunga akrual adalah pendapatan bunga dari kredit lancer dan dalam perhatian khusus. Dalam pengertian kredit disini termasuk giro

bersaldo debet (overdraft), kartu kredit (baki debet), transaksi yang berasal dari off balance sheet yang wan prestasi.

- b. Surat berharga Perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan note purchase agreement (NPA) dan pengambilalihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima (seperti SBPU). Yang dimaksud dengan surat berharga NPA adalah pembelian surat berharga yang disertai dengan pernyataan kesediaan bank untuk membeli surat berharga tersebut dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat diskonto tertentu.
- c. Penempatan pada bank lain Perhitungan pelanggaran BMPK penempatan antar bank atau pada bank lain didasarkan pada nilai nominal, kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Penempatan ini dapat berupa giro, deposito, call money, kredit, sertifikat deposito, surat berharga.
- d. Penyertaan Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca.
- e. Transaksi rekening administratif Untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan risiko kredit dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat penerbitan jaminan, aseptasi atau endosemen, irrevocable L/C atau SKBDN, akseptasi wesel impor, penjualan surat berharga dengan syarat repo, standby L/C dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan pada nilai nominal. Sedangkan risiko kredit dari transaksi derivatif didasarkan pada nilai risiko kreditnya.

2. Penentuan BMPK

Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. BI menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait. Pihak terkait dengan bank adalah

peminjam dan / atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank.⁶

E. *Penentuan Kualitas Aktiva Produktif*

Kualitas aktiva produktif memiliki suatu kriteria dalam menilai yaitu didasarkan pada tingkat kolektibilitas. Penggolongan kolektibilitas suatu aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Yang menjadi ukuran utamanya adalah ketetapan pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari segi usaha maupun nilai dari agunan kredit yang bersangkutan. Kualitas aktiva produktif dapat digolongkan menjadi lima yaitu:

- a. Lancar (Pass), jika memenuhi kriteria:
 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 2. Memiliki mutase rekening yang aktif
 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (Cash Collateral)
- b. Dalam perhatian khusus (Special Mention), jika memenuhi kriteria:
 1. Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 2. Kadang-kadang terjadi cerukan
 3. Mutase rekening relative aktif
 4. Didukung oleh pinjaman baru, dan lain-lain.
- c. Kurang lancar (Substandard), jika memenuhi kriteria:
 1. Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 2. Sering terjadi cerukan
 3. Mutase rekening relative rendah
 4. Lemahnya dokumentasi pinjaman
 5. Terdapat beberapa masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, dan lain-lain.
- d. Diragukan (Doubtful), jika memenuhi kriteria:
 1. Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau yang telah melampaui 180 hari
 2. Terdapat cerukan yang sifatnya permanen

⁶ 'Www.Bankbtpn.Co.Id 4.', 108–13.

3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 4. Terjadi kapitulasi bunga, dan lain-lain.
- e. Macet (Loss), jika memenuhi kriteria:
1. Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 2. Kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru
 3. Dari segi hukum serta kondisi pasarnya, jaminan tidak dapat dicairkan pada batas nilai wajar.

Penilaian aktiva produktif dalam perbankan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 mengenai Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif diukur dengan menggunakan beberapa rasio, diantaranya yaitu:

- a) Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) atau Bad Debt Ratio
- b) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Aktiva Produktif
- c) Rasio Pemenuhan PPAP atau Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (CAD)
- d) Rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB)
- e) Rasio Non Performing Loan (NPL)

Kualitas aktiva produktif merupakan suatu alat untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Tujuan atau maksud dari penilaian kualitas asset ini adalah untuk menilai kondisi asset bank termasuk didalamnya mengantisipasi atas resiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan.⁷

F. *Kriteria Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)*

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan cadangan penyisihan dari aktiva produktif yang dibentuk untuk menutup resiko kerugian dari penanaman dana. Berdasarkan SK Dir Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR, cadangan

⁷ Irna Meutia Sari, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap, 'Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan', *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINSTEK)*, 2020, 499–503.

PPAP terdiri atas dua yaitu cadangan umum dan cadangan khusus. Sejak 1993 sampai dengan 2001, besarnya pembentukan PPAP diklasifikasikan dalam 4 kelompok yaitu:

- a. Lancar/Gol.I (PPAP sebesar 0,5%)
- b. Kurang lancar/Gol.II (PPAP sebesar 5%)
- c. Diragukan/Gol.III (PPAP sebesar 50%)
- d. Macet/Gol.IV (PPAP sebesar 100%)

Sejak akhir 2001 pembentukan PPAP tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu:

- a) Lancar/Gol.I (PPAP sebesar 1%)
- b) Dalam perhatian khusus/Gol.II (PPAP sebesar 5%)
- c) Kurang lancar/Gol.III (PPAP sebesar 15%)
- d) Diragukan/Gol.IV (PPAP sebesar 50%)
- e) Macet/Gol.V (PPAP sebesar 100%)

Investasi asset dalam bentuk pinjaman yang diberikan dinyatakan lancar apabila penerimaan angsuran pinjaman dalam jangka waktu maksimum 30 hari. Dalam perhatian khusus apabila penerimaan angsuran pinjaman antara 31 hari sampai dengan 90 hari. Kurang lancar apabila penerimaan angsuran pinjaman antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Diragukan apabila penerimaan angsuran pinjaman antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Macet terjadi jika penerimaan angsuran pinjaman lebih dari 270 hari. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: ⁸

$$PPAP = \frac{PPAP}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

G. Kegiatan Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dr. Munir Fuady berpendapat bahwa restrukturisasi harus didasarkan pada itikad baik debitur karena harus diajukan permohonan atas kesadaran debitur dan

⁸ Vira Melinda, 'ANALISIS KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF (KAP), PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE (2012-2016)', *Tugas Akhir*, 2018, 1–103

akan terjadi proses negosiasi dalam penyelesaian kredit bermasalah. Bank hanya dapat melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, debitur dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik serta debitur dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi. Dari beberapa peraturan mengenai penilaian kualitas aset, penulis menyimpulkan faktor-faktor yang menjadikan dasar analisis bank yaitu; prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Setelah debitur melakukan permohonan, bank akan menganalisis permasalahan debitur, setelah itu bank akan menawarkan skema penyelesaian, perikatan akan terjadi setelah debitur menyepakati skema restrukturisasi tersebut. Keterbukaan penyampaian informasi mengenai kondisi debitur sangat mempengaruhi proses analisis bank. Restrukturisasi ditujukan bagi debitur yang usahanya berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi seperti; pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan tanpa batasan plafon.⁹

Dalam restrukturisasi kredit terdapat beberapa macam asas-asas hukum perjanjian, yaitu;

- a. Asas kebebasan berkontrak Bank dalam menuangkan isi dan bentuk perjanjian kredit atau restrukturisasi kredit memang dalam perjanjian baku. Tetapi asas kebebasan berkontrak itu erat dengan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Format perjanjiannya memang baku tetapi isi dan subyeknya itu ditentukan para pihak berdasarkan kesepakatan.
- b. Asas Konsensualisme Perjanjian kredit dan perjanjian restrukturisasi kredit dalam terlaksana apabila adanya kehendak antara debitur dan bank menyepakati. Setelah adanya perikatannya tersebut timbul hak dan kewajiban para pihak.
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*) Pada saat pengajuan kredit bank lalu terjadi permasalahan dan dilakukan restrukturisasi kredit semuanya berdasarkan adanya kesepakatan antara bank dengan debitur. Berdasarkan KUHPER pasal 1338 menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”

⁹ Suherman Nailia Andriani Sakinah, ‘PELAKSANAAN KONSEP RESTRUKTURISASI KREDIT PADA LEMBAGA BANK DAN NON BANK (STUDI PADA KCP BCA SYARIAH BOGOR DAN PT PEGADAIAN (PERSERO) BOGOR)’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4.1 (2021), 61–74.

- d. Asas itikad baik, Yang dimaksud asas itikad baik itu dapat meliputi; keinginan bank dalam membantu debitur yang kesulitan pemenuhan kewajiban, adanya kesadaran mengenai keterbukaan informasi yang diberikan oleh debitur kepada bank, Bukan hanya menunjukkan itikad baik pada saat pengajuan permohonan saja tetapi dalam pelaksanaan setelah terjadinya perikatan restrukturisasi harus dijalankan sesuai kewajibannya. Bank juga dalam menjalankan asas itikad baik harus menjaga obyek hak agunan debitur. Peraturan yang dikeluarkan OJK mengenai restrukturisasi kredit dalam menghadapi keadaan tertentu pada perbankan ternyata bukan ini saja, OJK pernah mengeluarkan POJK 45/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Akibat Bencana Alam. Penentuan daerah yang terkena bencana alam tersebut berdasarkan penentuan luas, jumlah korban dan kerugian materiil. Para debitur yang usaha atau proyeknya terkena dampak dapat mengajukan restrukturisasi. Kualitas kredit debitur ditetapkan lancar restrukturisasi sampai dengan 3 tahun setelah terjadi bencana alam. Seperti pada saat terjadinya gempa di Palu dan Donggala diberlakukan POJK 45/2017.¹⁰

H. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini mendapat pengaturannya dalam Peraturan Bank Indonesia No 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan bank Indonesia nomor 5/23/PBI/Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003. Dalam peraturan tersebut jelas bahwa, prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah ini wajib diterapkan oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam UU Perbankan 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Perbankan 1998. Ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing masing bank merupakan instrumen yang digunakan oleh bank terhadap nasabahnya. Kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan bank. Kebijakan bank dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁰ Budi Prana Prasetyo, 'TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.1 (2021), 305–28.

- a. Kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah;
- c. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Sehubungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam industri perbankan ini, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Merger, Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan tersendiri dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Bank Indonesia juga mengeluarkan sejumlah petunjuk pelaksanaan, di antaranya dalam:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBPR tanggal 22 April 2004 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan di atas, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan cara antara lain mengidentifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, dan lainnya, yang tersimpul dalam dokumentasi profil nasabah, yang minimal berisikan data identitas, pekerjaan/bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening nasabah. Serta membentuk unit kerja khusus dan/ atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah serta menerapkan prinsip mengenal nasabah yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada di luar negeri, sepanjang standar prinsip mengenal nasabahnya sama atau lebih ketat daripada yang

diatur dalam Peraturan BI. Jika ketentuan setempat lebih longgar, maka yang wajib diterapkan adalah PBI KYC. Penerapan ini yang mengakibatkan pelanggaran ketentuan negara setempat wajib dilaporkan ke kantor pusat bank tersebut dan BI.

Oleh karena itu pihak bank harus mengetahui karakter dan identitas dari nasabahnya karena dengan mengetahui karakter nasabahnya dengan baik maka bank dapat terhindar dari penyalahgunaan jasa oleh nasabahnya. Penyalahgunaan dalam hal ini berupa tindak pidana perbankan. Salah satu jenis tindak pidana perbankan yang rawan terjadi adalah pencucian uang (money laundering). Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakkan hukum dalam menjalankan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan program anti pencucian uang oleh perbankan diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi. Profil nasabah yang wajib dipelihara oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi yang meliputi antara lain yaitu: a. Pekerjaan atau bidang usaha b. Jumlah penghasilan c. Rekening lain yang dimiliki d. Aktivitas transaksi normal e. Tujuan pembukaan rekening Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi baik terhadap nasabah perorangan maupun perusahaan.

Kewajiban pemantauan identitas, transaksi serta rekening nasabah (record keeping obligations) yang kemudian dilaporkan kepada Financial Intelligence Unit (PPATK) mewujudkan terciptanya database informasi yang dapat dipergunakan oleh FIU/PPATK dan penegak hukum untuk menelusuri proses terjadinya money laundering sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Baik dalam PBI KYC maupun dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang bank diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (suspicious transaction report) yaitu: transaksi keuangan yang mentimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah; transaksi yang patut diduga untuk menghindari pelaporan; dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, kepada PPATK. Dengan ditetapkannya ketentuan ini maka petugas bank wajib memastikan bahwa pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank mempunyai keyakinan atas

kredibilitas yang bersangkutan dan rekeningnya dipergunakan untuk kepentingan usahanya maupun keperluan pribadinya.

Dalam rangka pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, bank harus melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap:

- 1) Calon nasabah yang berasal
- 2) dari negara yang diklasifikasikan sebagai high risk countries atau negara yang belum/ tidak menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah.
- 3) Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai saran pencucian uang Calon nasabah yang mempunyai resiko tinggi, seperti pejabat pemerintah, politikus, pimpinan negara, pejabat pengadilan atau militer, dan pejabat eksekutif badan usaha milik pemerintah, anggota legislatif, dll.

Bilamana perlu dilakukan kunjungan setempat (site visit) untuk meneliti apakah kondisi kegiatan usaha nasabah memang sesuai dengan volume usaha dan arus kas (cash flow) yang ada. Prosedur identifikasi nasabah dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah tidak hanya secara prosedur pada umumnya dalam pembukaan rekening seperti yang tercantum dalam Pasal 4, 5, 6, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tetapi juga harus bisa menggali lebih dalam tentang nasabah itu sendiri, karena tidak dapat dimungkiri kecanggihan teknologi saat ini juga menunjang terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai macam bentuk, sehingga bank juga harus bisa menganalisa lebih detail tentang karakteristik nasabah demi mengantisipasi atau mencegah munculnya celah yang bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencucian uang.¹¹

I. Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan kecukupan modal, menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan capital adequacy ratio didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang

¹¹ Nurfitriyani, 'Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12.2 (2021), 36–49.

mengandung resiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu risk margin terhadap jumlah penanamannya. Pengukur CAR :

$$\text{CAR} = \text{MODAL} / \text{ATMR} \times 100\%$$

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari rasio keuangan yang dibuat Biro Riset InfoBank. Selain itu juga digunakan data sekunder dari laporan publikasi Bank Indonesia, badan pusat statistik, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian dan sumber-sumber lain untuk menganalisa berpengaruh terhadap NPF industri Perbankan.¹²

J. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhamad, 2005). Rasio FDR digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Dendawijaya, 2003).¹³

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank Return on Asset (ROA) akan semakin meningkat, sehingga Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA).

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh

¹² Maidalena, 'Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah', *Human Falah*, 1.1 (2014), 127–38.

¹³ Zubaidah and Hartono.

dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: ¹⁴

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{Jumlah Dana yang diberikan}} \times 100\%$$

K. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas term of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potential loss. Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. ¹⁵

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

¹⁴ Suryani, 'ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKANSYARIAH DI INDONESIA (Rasio Keuangan Pada BUS Dan UUS Periode 2008-2010)', *Conomica*, II.2 (2012).

¹⁵ Solihatun, 'ANALISIS NON PERFORMING FINANCING (NPF) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2012', 2012.

Non Performing Financing (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Tugas Bank Indonesia (BI) antara lain adalah mempertahankan dan memelihara sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Untuk itu BI selaku Bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank-Bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.

1. Non Performing Financing (NPF) Gross

NPF Gross adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank. Rumus NPF Gross adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 s/d 5} \times 100\%}{\text{Total Kredit yang diberikan}}$$

2. Non Performing Financing (NPF) Net

NPF Net adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank. Rumus NPF Gross adalah sebagai berikut: ¹⁶

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 s/d 5} - \text{PPAP dengan kolektibilitas 3 s/d 5} \times 100\%}{\text{Total Kredit yang diberikan}}$$

L. *Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional

¹⁶ Maidalena.

dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.¹⁷

Menurut Dendawijaya (2003) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank tersebut, kemudian sebaliknya. Beban Operasional adalah beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pokok perusahaan dan biaya usaha ini jumlahnya dalam laporan rugi laba akan dilawankan dengan laba kotor. Sedangkan pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha yang benar-benar telah diterima. BOPO dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: ¹⁸

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

¹⁷ Muhammad Hilda Al Iqbal and Iwan Budiyo, 'Analisis Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Inflasi Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2020), 1

¹⁸ Fatimah Eka Ningsih, 'Analisis Perbandingan Beban Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.Cabang Batam', *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1.2 (2013), 140–46.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penilaian Kesehatan bank merupakan hasil penilaian pada kondisi bank yang dilakukan untu mengatasi risiko dan kinerja bank atau dapat juga dikatakan bahwa penilaian Kesehatan bank adalah cerminan sebuah bank dapat menjalankan fungsinya.

Adapun pemenuhan peraturan perbankan yaitu :

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (RKPM)
2. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBMK)/ Pembiayaan
3. Penentuan Kualitas Aktiva Produktif
4. Kriteria Penyisihan Penghapusan Aktiva Tetap (PPAP)
5. Kegiatan Restrukturisasi Kredit
6. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

B. Saran

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap kepada teman-teman pembaca dapat memahami apa yang kami paparkan. Adapun kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk peningkatan makalah kami kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

‘BAB II’, 35.2 (2011), 13–37

———, 21, 2011, 10–27

Al Iqbal, Muhammad Hilda, and Iwan Budiyo, ‘Analisis Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Inflasi Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016–2019’, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2020), 1

Maidalena, ‘Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah’, *Human Falah*, 1.1 (2014), 127–38

Nailia Andriani Sakinah, Suherman, ‘PELAKSANAAN KONSEP RESTRUKTURISASI KREDIT PADA LEMBAGA BANK DAN NON BANK (STUDI PADA KCP BCA SYARIAH BOGOR DAN PT PEGADAIAN (PERSERO) BOGOR)’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4.1 (2021), 61–74

Ningsih, Fatimah Eka, ‘Analisis Perbandingan Beban Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.Cabang Batam’, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1.2 (2013), 140–46

Nurfitriyani, ‘Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010’, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12.2 (2021), 36–49

Prasetyo, Budi Prana, ‘TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN’, *Jurnal Hukum Adigama*, 4.1 (2021), 305–28

Raturandang, Ireyny Filania, Joula Rogahang, and Dantje Keles, ‘Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity) Pada PT.Bank Sulut-Go’, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6.3 (2018)

Sari, Irna Meutia, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap, ‘Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan’, *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains*

(*SAINSTEK*), 2020, 499–503

Solihatun, ‘ANALISIS NON PERFORMING FINANCING (NPF) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2012’, 2012

Suryani, ‘ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKANSYARIAH DI INDONESIA (Rasio Keuangan Pada BUS Dan UUS Periode 2008-2010)’, *Conomica*, II.2 (2012)

Vira Melinda, ‘ANALISIS KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF (KAP), PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE (2012-2016)’, *Tugas Akhir*, 2018, 1–103

‘Www.Bankbtpn.Co.Id 4.’, 108–13

Zubaidah, Amalia Nur, and Toni Hartono, ‘Analisis Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return on Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.1 (2019), 16–30